



Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume , No. , Tahun 2014, Hal:

Online di <http://fisip.undip.ac.id>

**ANALISIS FENOMENA GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR
JAWA TENGAH 2013**

Nuri Mukti yuda Wibawa, Dra. Hermini S, M.Si, Drs. Susilo Utomo

D2B 009 052

(whowhok46@gmail.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50239.

The phenomenon of swing voters in every election in Indonesia is quite interesting to study. Central Java is one of the provinces with a high non-vote behavior rate. Pati District, in Wonogiri District, Temanggung District a county with a high level of non-vote behaviour, moderate, and low in Central Java Province. non-vote behaviour can be regarded as a form of democratic failure. non-vote behaviour when linked with the "right to choose" is the right of every individual to choose or not choose. Each individual is free to choose the party or candidate that coveted and also free to choose any party or candidate.

The data used in this study is the type of quantitative data, ie data in the form of numbers or numbers. In accordance with its shape, quantitative data can be processed or analyzed using statistical calculations. According to the logic of the study, this research can be classified as deductive research as a structure of concepts or theories developed for later tested by an empirical observation. Thus this study will describe the facts and explain the circumstances of the research object, based on facts that exist to try to analyze based on the data obtained were correct.

These results explain the reason for the cause of responden not interested in voting in the election of the Governor of Central Java, among others, have other activities while governor election, deliberately did not come because I was lazy, and did not get an allowance. Whether or not the governor's race, state of Central Java community will remain the same with empty promises. Likewise also from the standpoint of leadership, Central Java Governor election will be deemed not produce visionary leadership and has an impact on community change Central Java

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Sikap dan perilaku politik individu seyogyanya mendasari pada kehendak hati nurani secara sukarela dalam kehidupan politik. Keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting, dan paling ditekankan adalah sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik. Setiap individu harus menyadari peranan mereka berkontribusi sebagai insane politik, meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta aksi demonstrasi. Namun kegiatan-kegiatan sudah barang tentu harus dibarengi rasa sukarela sebagai kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik.

Pemilihan kepala daerah sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat melalui suksesi pada pemilihan kepala daerah, peran warga masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas. Dengan adanya pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. Setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye. Sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik terkadang mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Sikap apatis, sinisme, dan arogan membawa dampak kepada sikap masyarakat yang enggan memberikan suara pada saat pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye).

Peningkatan persentase angka Golput pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2008 angka Golput sebesar 42% dan menjadi 48% pada pemilihan Gubernur 2013. Golput dapat dikatakan sebagai wujud kegagalan demokrasi. Bagi perkembangan demokrasi di Indonesia tingkat golput yang tinggi harus mendapatkan perhatian yang serius, meskipun legitimasi pilkada tidak dipengaruhi oleh presentase pemilih, atau besarnya golput tidak akan mempengaruhi atau membatalkan pilkada. Akan tetapi, kondisi ini akan menciptakan rendahnya legitimasi pemerintah daerah dan akan menciptakan masyarakat yang anti terhadap perkembangan politik di daerahnya dan akan membuat lemah nilai – nilai demokrasi yang dibangun Negara kita. Walaupun hakikatnya, Golput apabila dikaitkan dengan “hak memilih” merupakan hak setiap individu untuk memilih atau tidak memilih. Setiap individu bebas untuk memilih partai atau calon yang didambakan dan juga bebas untuk tidak memilih satupun partai atau calon.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan *research question* yang menjadi rumusan permasalahan dalam studi yaitu Bagaimana fenomena golput pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena golput pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan alasan-alasan Golput pemilihan Gubernur Jateng 2013

1.4 Tinjauan Pustaka

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (2009) mengatakan bahwa kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah dilaksanakan. Kegiatan partisipasi pemilih dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Sedangkan menurut Milbarth dan Goel membedakan partisipasi pemilih menjadi beberapa kategori. Pertama, Apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik dari proses politik. Kedua, spektator, orang yang pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik seperti komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Keempat, pengkritik, bentuk partisipasi tak konvensional. Bentuk partisipasi pemilih diperjelas oleh pendapat Afan Gaffar bentuk partisipasi masyarakat dalam politik ada lima, pertama *electoral activity*, kedua *lobbying*, ketiga *organizational activity*, keempat *contracting*, kelima *violence*.

Dalam definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. Perilaku Pemilih

Menurut Ramlan Surbakti perilaku memilih merupakan keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perilaku memilih mencakup memilih dan juga tidak memilih, memberikan suara atau tidak memberikan suara (golput) dalam pemilu. Pemilih mempunyai pandangan yang obyektif sekaligus subyektif ketika memilih sebuah partai atau seorang kontestan dalam diri pemilih terdapat dua orientasi sekaligus yaitu orientasi *policy-problem-solving* dan *orientasi ideologi*.

Pertimbangan pemilih dipengaruhi oleh tiga faktor pada saat yang bersamaan pertama kondisi awal pemilih, kedua media massa dan ketiga partai politik atau kontestan. Dari ketiga faktor tersebut dan dipengaruhi oleh orientasi ideologi dan orientasi *policy-problem-solving* pemilih dapat dikategorikan menjadi pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih skeptis dan pemilih tradisional.

Jika seseorang memutuskan untuk memilih atau tidak memilih kandidat atau parpol mana yang dipilihnya, hal ini disebabkan karena si pemilih merasa yakin bahwa kandidat atau parpol yang dipilihnya dalam pemilu diyakini akan mampu membawa dan memperjuangkan aspirasinya. Jika tidak maka ia akan berlaku sebaliknya yaitu menolak untuk memberikan suara dan tidak menandatangani pilihannya pada kandidat atau parpol yang bersangkutan. Sikap seperti inilah yang menyertai kekuatan sosial politik dan dapat mempengaruhi pemilih dan pilihannya untuk memilih atau sama sekali tidak memilih ataupun golput.

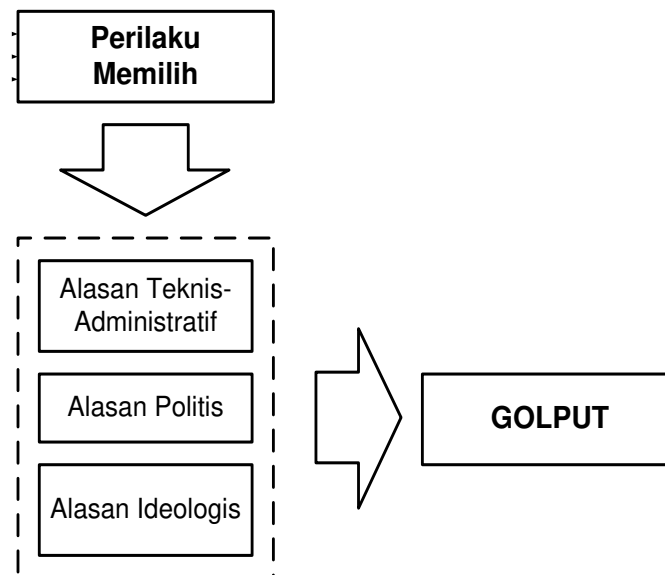
2. Perilaku Golput

Golput (*non-voting behaviour*) dipahami sebagai bentuk partisipasi politik warga negara yang muncul karena beragam latar belakang. Memilih adalah hak politik warga

negara yang mengandung kebebasan pemilik hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya

Golput bisa dilihat dari berbagai segi karena cakupannya yang begitu luas, menurut Eep Saifullah Fatah (2007) membagi golput menjadi empat macam. Pertama golput teknis yakni mereka yang karena sebab sebab teknis tertentu menjadi golput. Misalnya karena sakit parah dan tidak bisa memilih. Kedua, golput teknis politis yakni golput karena kesalahan teknis dari KPU atau diri sendiri. Ketiga, Golput politis yakni mereka yang merasa tidak mempunyai pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan atau perbaikan. Keempat, golput ideologis yakni mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama maupun alasan politik ideologis lainnya .

Kerangka Fenomena Golput



alasan orang untuk memilih golput:

1. Alasan teknis administrative ; seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih atau berhalangan hadir pada saat pemilihan, seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. Bisa juga karena malas pergi ke TPS dan keliru atau salah dalam proses pencoblosan sehingga suaranya tidak sah.
2. Faktor teknis-politis; seseorang yang terganjal sistem pendaftaran (registrasi) pemilih dan atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan penyelenggaraan. Karena untuk bisa memilih, umumnya calon pemilih harus terdaftar sebagai pemilih terlebih dahulu. Sistem pendaftaran yang rumit dan tidak teratur mengurangi minat orang dalam pemilihan.
3. Faktor ideologis; mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat di dalamnya karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain

Golput disisi lain juga bisa dimaknai sebagai sebuah solusi bagi mereka yang menginginkan sebuah perubahan karena masyarakat sudah menjadi semakin pintar dan dewasa tidak mudah untuk dibohongi oleh janji janji kosong. Masyarakat yang tidak suka memilih calon tertentu tidak percaya dan bosan dengan janji janji palsu maka masyarakat lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput

3. Teori Perilaku Pemilih (*Voter Behavior*)

Secara teoritis ada dua penjelasan teori mengapa seseorang tidak ikut memilih dalam pemilihan. Penjelasan pertama bersumber dari teori-teori mengenai perilaku pemilih (*voter behavior*). Penjelasan ini memusatkan perhatian pada individu. Besar kecilnya partisipasi pemilih (*voting turnout*) dilacak pada sebab-sebab dari individu pemilih. Secara umum analisa-analisa mengenai “*voting behaviour*” atau perilaku pemilih didasarkan pada tiga pendekatan atau model yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.

3.1 Dimensi Sosiologis

Dimensi ini merupakan pendekatan yang menekankan pada peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Seseorang untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, etnis, ideologi, dan kondisi-kondisi sosiologis lainnya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.

Golput sosiologi juga dapat disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomie, dan alienasi.

3.2 Dimensi Psikologis

Dimensi ini lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik seseorang, dimana dimensi psikologis merupakan perilaku memilih seseorang yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi individu terhadap kandidat ataupun partai tertentu melalui proses sosialisasi dan resosialisasi seperti keluarga, lembaga pendidikan, orang tua, dan media massa.

3.3 Dimensi Politik Rasional

Pendekatan ini dipelopori oleh Anthony Downs (1957) yang melihat orientasi pemilih dalam menentukan sikapnya dipengaruhi oleh dua hal, yakni orientasi isu dan kandidat (figur). Orientasi isu berpusat pada program-program yang diusung oleh kandidat, sedangkan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya.

1.5 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif karena studi ini berusaha untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik serta melukiskan suatu objek atau peristiwa historis tertentu yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tertentu

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban responden terhadap kuesioner yang dikirimkan kepada responden yaitu seluruh jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang tersebar di Jawa Tengah. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subyek, yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sumber data penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang dikirim kepada responden, dalam hal ini seluruh masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang tersebar di Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode research survey yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pernyataan tertulis. Metode research survey yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis. Masing-masing interval sampel terpilih (Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Temanggung).

Analisis data adalah kegiatan mengolah data dari data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Kegiatan ini meliputi, Reduksi data, adalah proses penyederhanaan data dengan pemilahan dan mengubah data kasar menjadi sebuah data yang terorganisir dan terarah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data, menampilkan data yang sebelumnya telah direduksi kemudian disusun dan dikategorikan. Menarik kesimpulan, adalah langkah terakhir dalam proses analisis data yang mendeskripsikan data sesuai dengan hasil kuesioner agar dapat memperkuat argumen dari narasumber.

1.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat dirangkum sebagai berikut.

Pengetahuan Terhadap Pilgub Jateng 2013

1. Sebagian besar responden (63,5%) mengaku menggunakan hak pilihnya (tidak golput) pada waktu pemilihan umum legislative ketika diadakan pemilu. Demikian halnya, mereka juga mengaku pernah mendengar adanya berita penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013. Media yang diakui paling banyak pemberitakan adanya Pilgub Jateng adalah televisi, brosur/pamphlet/selebaran, radio, surat kabar/ majalah dan hubungan personal
2. Mayoritas responden (73,1 %) menganggap jabatan gubernur penting dan masih efektif dalam memimpin jalannya roda pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, hanya saja di era otonomi daerah ini fungsi gubernur kurang jelas dan tidak sekuat bupati walikota
3. Responden sebanyak (89 %) mengaku membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilgub Jateng melalui forum-forum tidak resmi, seperti di arena PKK dan arisan, di warung-warung dan sebagainya.

Tipologi Golput

1. Seluruh responden dalam penelitian ini mengaku menerima kartu pemilih kartu pemilih dan surat undangan, mereka tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) pada Pilgub Jateng 2013 yang lalu. Alasan-alasan penyebab terjadinya responden tidak tertarik mencoblos pada pilgub Jateng antara lain, memiliki kegiatan lain saat dilangsungkannya Pilgub (seperti sedang bekerja, keluar kota, dan lain-lain), sengaja tidak datang karena malas, dan tidak dapat

uang saku. Dengan demikian, apapun alasannya, yang jelas ketidakhadirannya pada saat pemungutan suara (Golput) pada Pilgub Jateng mengindikasikan bahwa alasan teknis-ekonomi ikut memperkuat besarnya Golput pada Pilgub Jateng 2013.

2. Mayoritas responden (58,4%) menganggap Pilgub 2013 tidak mampu memenuhi harapan masyarakat akan adanya perubahan masyarakat Jateng yang lebih baik. Alasannya, ada atau tidaknya Pilgub, keadaan masyarakat Jateng tetap akan sama saja dan janji-janji kosong. Demikian juga jika dilihat dari sudut kepemimpinan, Pilgub Jateng kali ini dianggap tidak akan menghasilkan kepemimpinan yang visioner dan memiliki dampak terhadap perubahan masyarakat Jateng. Alasannya, Profil Cagub Jateng tidak menjanjikan perubahan tidak banyak berubah, kepemimpinannya sama saja dan alasan lainnya seperti jabatan Gubernur tidak adagunanya. Berdasar hal-hal seperti diatas, fenomena Golput seperti ini termasuk dalam Golput Politis.

3. Mayoritas Responden (56,2%) menganggap Pilgub sebagai cara yang tepat dalam menentukan kepemimpinan sedangkan responden lainnya (43,8 %) menganggap tidak tepat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa secara ideologis mayoritas responden menganggap pilgub merupakan cara yang tepat untuk memilih dan menentukan kepemimpinan. Alasan-alasannya, mereka menganggap Pilgub Jateng memberikan hak dan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pemimpinnya.

4. Fenomena golput pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 paling besar adalah alasan teknis-ekonomis dan alasan politis.

1.7 Penutup

Fenomena Golput dalam Pilgub Jateng, hanyalah karena alasan-alasan teknis-ekonomis dan alasan politis. Sedangkan Golput alasan ideologis tampaknya tidak terlalu besar persentasinya dan alasan-alasan yang menolak Pilgub sebagai sarana/cara tepat memilih pemimpin secara substansial tidak termasuk alasan –alasan yang bersifat ideologis, tetapi politis, seperti alasan : sebaiknya gubernur dipilih/ditunjuk Presiden, pilgub hasilnya sama saja, pilgub hanya menghambur-hamburkan uang.

Saran-saran

Untuk Penyelenggara Pilgub

Hendaknya kebijakan mengenai system administrasi penyelenggara Pilgub mendatang dapat disempurnakan, yaitu membuat model administrasi dimana pemilih dapat melakukan pencoblosan di tempat lain diluar TPS dimana mereka berada. Dengan demikian, bagi pemilih yang memiliki kegiatan lain pada saat Pilgub berlangsung, dapat menggunakan hak pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asfar Muhammad, Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Pemilih, Jurnal Ilmu Politik Edisi No. 16, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

Coleman James S., "*Rational Choice Theory*," dalam F Borgotta, ed. , *Encyclopedia of Sociology, Vol III (New York: Macmillian Publishing Company, 1992)*

Efriza , Political explore, bandung: Alfabeta , 2012

- Firmanzah, *Marketing Politik*, yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2012
- Huntington, S. P. & Nelson, J. (1977). *No easy choice political participation in developing countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- IPD, Sahdan Gregorius, Muhtar Haboddin, *Evaluasi kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*, IPD, Yogyakarta, 2009
- McClosky, H. (1972). *Political participation, international encyclopedia of the social science*, (2nd ed.). New York: The Macmillan Company and Free Press
- Nie, N. H. & Verba, S. (1975), *Political participation, handbook of political science*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta, 1985 CV. Rajawali
- Sherman Arnold K. dan Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics*, California: A Division of Wodsworth Inc, 1987
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1999
- Syafiie Inu kencana, *pengantar ilmu pemerintahan*, refika aditama, Bandung, 2009
- Wahid KH Abdurrahman, Halim HD, *Mengapa Kami Memilih golput*, 2009

Web

- Kompasiana, Menelaah Politik Golput, <http://politiki.kompasiana>, 12 juni 2013.
- Kompasiana, Jangan Salah Kan Golput, <http://politiki.kompasiana>, 12 juni 2013
- Eep Saefulloh Fatah dalam Hery M.N. Fathah, Fenomena Golput dan Krisis Kepercayaan, <http://www.lampungpost.com>